

IMPLEMENTASI PROGRAM P₅ MENURUT TEORI GEORGE C. EDWARD III DI SMA NEGERI 9 MALANG

Sri Untari *, Inka Dwi Lestari, Keke Aqila Zayyan, Takfiki Ilma, Wiji Astuti

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

*Corresponding author, email: sri.untari.fis@um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v5.i7.2025.5

Keywords

Policy implementation
P5 Programme
George C. Edward III

Kata Kunci

Implementasi kebijakan
Program P5
George C. Edward III

Abstract

This article focuses on analysing the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) at SMA Negeri 9 Malang using the policy implementation theory of George C. Edward III. In this research, the author explores four key factors that influence the success of policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Using a descriptive qualitative approach, this study collected data through three main methods: interviews, observation, and documentation. The findings showed that the implementation of the P5 Programme in the school generally went very well. Communication between the school, teachers and learners is effective, supported by an adaptive bureaucratic structure that supports the implementation of the programme. However, there are still some problems to be overcome, especially in the resource aspect. The lack of teachers who train as facilitators and assessors is an obstacle in optimising the project-based learning process. In addition, the location of schools in urban areas causes limited access to project materials related to nature, thus limiting the variety of project themes. However, there is an important note related to the disposition of learners: they tend to be more concerned with the end result of the project than the learning process that is actually designed to develop their skills. This tendency is considered to detract from the main essence of the Pancasila Learner Profile Strengthening Project.

Abstrak

Artikel ini fokus menganalisis pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Negeri 9 Malang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi empat faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program P5 di sekolah tersebut secara umum berjalan dengan sangat baik. Komunikasi antara pihak sekolah, guru, dan peserta didik berlangsung efektif, didukung oleh struktur birokrasi yang adaptif dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, masih ada beberapa masalah yang harus diatasi, terutama pada aspek sumber daya. Kurangnya tenaga guru yang berlatih sebagai fasilitator dan penilai menjadi kendala dalam optimalisasi proses pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, lokasi sekolah yang berada di perkotaan menyebabkan keterbatasan akses terhadap bahan proyek yang berhubungan dengan alam, sehingga membatasi variasi tema proyek. Namun, terdapat catatan penting terkait disposisi peserta didik mereka cenderung lebih mementingkan hasil akhir proyek daripada proses pembelajaran yang sebenarnya dirancang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Kecenderungan ini dinilai dapat mengurangi esensi utama dari Proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan elemen penting untuk menunjang dan menentukan kesejahteraan masyarakat, menurut Nafaridah et al., (2023) sistem pendidikan membutuhkan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembaruan dan pengembangan Kurikulum Pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan di Indonesia menurut Anggita (2023) harus terus berevolusi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, dengan sejumlah perubahan yang telah terjadi sepanjang waktu. Setiap pergantian kurikulum pada dasarnya merupakan respons terhadap tantangan pendidikan yang selalu berevolusi, baik dari aspek metodologi pengajaran, kompetensi yang ingin dicapai, maupun tuntutan keterampilan yang dibutuhkan dalam konteks global. Kurikulum selalu berubah sesuai perkembangan zaman (Wahyudin et al., 2024). Untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan yang ada di masa depan, diperlukan rencana langkah demi langkah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. UNESCO (2021) memperkuat hal ini dalam *Reimagining our Future Together*, yang mengatakan bahwa kita harus beralih dari pandangan pendidikan yang sempit ke keterlibatan yang lebih besar dalam tujuan pendidikan yang lebih besar. Sebuah pendekatan kurikulum seharusnya menghubungkan domain kognitif dengan kemampuan memecahkan masalah, inovasi, dan kreativitas. Itu juga harus melibatkan pertumbuhan pembelajaran terkait diri dan sosial emosional.

Salah satu Langkah inovatif dari Pendidikan yaitu dengan adanya Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan pendidikan revolusioner yang bertujuan memberdayakan siswa dan mengembangkan keterampilan kritis untuk menghadapi tantangan abad ke-21 (Firdaus et al., 2022). Inisiatif ini diluncurkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan tujuan strategis mengatasi kesenjangan pendidikan Indonesia, khususnya dalam kemampuan literasi dan numerasi.

Melalui pendekatan inovatif ini, Kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih dinamis, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik dan tuntutan global. Salah langkah inovatif yang di ambil oleh pemerintah adalah P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), program yang memiliki tujuan pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik dengan pengalaman pembelajaran berbasis proyek. Fokus utama P5 adalah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga mendapat keterampilan sosial-emosional dan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. P5 Kurikulum Merdeka adalah ide kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik secara menyeluruh dan berfokus pada peserta didik. Konsep ini memiliki untuk membangun suasana belajar yang kreatif, inovatif, dan memperhatikan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2023), terdapat lima nilai penguatan pendidikan karakter yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu: nilai-nilai non-sekuler, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas. Penguatan pendidikan bagi pria dan wanita merupakan inisiatif akademik di sekolah yang bertujuan untuk memperkuat karakter mereka melalui proses transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik. Hal ini dilakukan dengan mengharmonisasikan hati (etika dan spiritual), rasa (estetika), pemikiran (melek huruf dan berhitung), dan berolahraga tubuh (kinestetik) sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.

Dalam konteks ini, SMA Negeri 9 Malang menjadi salah satu sekolah yang aktif mengimplementasikan program P5 sebagai bagian dari upaya untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan unggul. Implementasi kebijakan pendidikan seperti P5 memerlukan pendekatan yang sistematis dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menganut pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III digunakan untuk meneliti pelaksanaan program P5 di SMA Negeri 9 Malang. Teori pelaksanaan kebijakan oleh Edward III menyediakan kerangka untuk mengevaluasi implementasi P5 di SMA Negeri 9 Malang dengan mempertimbangkan empat faktor kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan lensa teori ini, sekolah dapat secara kritis mengevaluasi dan memperbaiki

tantangan yang ada dalam implementasi P5, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengembangan profil pelajar yang berjiwa Pancasila.

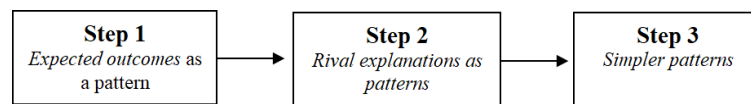
2. Metode

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang melibatkan lokasi atau tempat spesifik yang akan digunakan untuk mengamati berbagai fenomena yang berkaitan dengan studi yang dilaksanakan, Astutik dan Farista (2023). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menganalisis interpretasi teks dan hasil wawancara untuk memahami makna suatu peristiwa (Sugiyono, 2023). Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti dan informan untuk menyamakan pandangan mereka. Metode ini dipilih sebab analisis tidak bisa diwakili dengan angka, dan peneliti biasanya memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena sosial. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan disajikan secara deskriptif dengan bahasa yang mudah dimengerti. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sebuah peristiwa atau untuk mengeksplorasi serta menjelaskan fenomena tertentu.

Sumber data pada penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi guru yang berperan sebagai fasilitator P5 dan peserta didik yang mengikuti P5 di SMA Negeri 9 Malang. Sumber data sekunder secara tidak langsung memberikan informasi tambahan dan memperkuat data penelitian berupa dokumen, studi literatur, pemanfaatan media cetak dan online, serta catatan lapangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis. Untuk melaksanakan penelitian ini, instrumen yang dibutuhkan meliputi panduan untuk observasi, panduan wawancara, perangkat perekam suara, kamera, serta alat tulis untuk mencatat informasi yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis domain dengan pencocokan pola deskriptif.



Gambar 1. Tahapan Analisis Data Menggunakan Pattern Matching
Sumber: Yin (2014)

Berdasarkan Gambar 1, tahapan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap awal, peneliti menentukan hasil yang diharapkan sebagai sebuah pola dengan memilih jawaban sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahap ini berfungsi memandu peneliti dalam menyusun instrumen yang tepat sehingga valid dan mampu mendukung jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Selanjutnya, peneliti melakukan penjelasan saingan sebagai pola dengan mengelompokkan data sesuai kategori masalah yang diselidiki, membandingkan berbagai sumber data serta metode pengumpulan data, dan mengurangi data yang tidak relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Pada tahap akhir, peneliti menyederhanakan pola tersebut sehingga lebih ringkas dan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, lalu menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Program P5 di SMA Negeri 9 Malang

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan salah satu implementasi dari Kurikulum Merdeka (Prinada, 2023). P5 bertujuan untuk memperkuat karakter siswa yang sejalan dengan enam nilai Pancasila, meliputi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui keragaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, serta kreatif (Intan dkk., 2023). P5 mengajak siswa untuk belajar dengan metode proyek yang berfokus pada kegiatan nyata

(*Project Based Learning*). Keunikan pelaksanaan P5 terletak pada fleksibilitasnya, tidak terikat pada spesifik mata pelajaran, dan dapat dikaitkan dengan berbagai aktivitas di sekolah.

P5 merupakan pembelajaran yang melibatkan beragam disiplin ilmu dengan cara mengamati dan mencari solusi untuk masalah di sekitar. P5 merupakan sebuah proyek yang terdiri dari serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dengan memilih tema yang relevan terhadap isu di lingkungan sekitarnya. Proyek ini dirancang agar siswa dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Siswa beraktivitas dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menghasilkan suatu produk atau tindakan. Sesuai dengan Pedoman Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan kegiatan kokurikuler yang menekankan pendekatan proyek untuk meningkatkan upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila yang berlandaskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Empat alur tahapan P5 dalam kurikulum Merdeka menurut Prinada (2023), yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Pada tahap pengenalan, guru dan peserta didik memulai proyek dengan menciptakan pemahaman dasar mengenai tema yang dipilih untuk memberikan gambaran umum tentang masalah atau peluang yang akan dijelajahi. Tema yang dipilih harus relevan dengan isu-isu terkini dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kedua yaitu kontekstualisasi, yang bertujuan untuk menghubungkan tema dengan situasi yang ada, peserta didik didampingi guru untuk mengeksplorasi pandangan dan praktik dalam masyarakat. Tahap ini sangat penting untuk memastikan proyek yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik lingkungan sekitar.

Tahap selanjutnya adalah aksi yang merupakan inti dari pelaksanaan proyek, di mana peserta didik mulai melaksanakan rencana aksi yang telah disusun. Pada tahap ini peserta didik berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan proyek. Refleksi merupakan langkah terakhir, tujuannya untuk merenungkan proses dan hasil proyek. Peserta didik dan guru bersama-sama untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, mengidentifikasi pencapaian dan kekurangan selama proyek. Tahap ini juga dapat memberikan pengalaman bagi guru untuk merancang proyek yang lebih baik lagi untuk kedepannya.



Gambar 2. Aktivitas P5 di SMA Negeri 9 Malang

Dalam upaya mewujudkan "Pelajar Pancasila", program Kurikulum Merdeka dilaksanakan sebagai bagian dari rencana perubahan sistem pendidikan Indonesia (Menteri Pendidikan et al., 2024). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah langkah dalam proses belajar untuk mencapai Profil Pelajar Pancasila. Berdasarkan (Kemendikbudristek, 2021), Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila terdiri dari dua kegiatan utama: proses belajar dalam kurikulum dan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Sebagai inovasi baru dalam sistem pendidikan Indonesia, program ini menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam implementasinya, seperti terdapat kendala pada sumber daya guru yang terbatas. Banyak guru belum menerima pelatihan yang memadai untuk menerapkan program baru ini. Mereka mengalami kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum baru yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Selain itu, sejumlah guru merasa tidak nyaman dengan adanya kebebasan dalam merancang pembelajaran. Penyebaran informasi yang tidak merata menimbulkan perbedaan persepsi dan praktik penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah.

Kurangnya pelatihan dan pedoman yang konsisten semakin memperumit situasi, karena keputusan dan panduan penerapan kurikulum kerap berubah.

Tantangan lain yang dihadapi sekolah adalah adanya keterbatasan sumber daya yang signifikan. Hal ini mencakup kekurangan buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan untuk penerapan model pembelajaran yang lebih variatif. Tantangan eksternal juga memengaruhi implementasi program. Beberapa orang tua tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli materi pembelajaran tambahan atau mendukung kegiatan ekstrakurikuler, yang dapat menghambat partisipasi penuh peserta didik dalam program ini.

Implementasi P5 di SMA Negeri 9 Malang ini sudah sesuai dengan panduan Kemendikbudristek, namun tetap disesuaikan dengan kondisi sekolah. Fasilitas penunjang untuk pelaksanaan P5 sangat memenuhi. Implementasi P5 di sekolah ini sudah terselenggara sesuai dengan perencanaan, baik dari segi alokasi waktu, target capaian tema, dan produk luarannya. Penyelenggaraan pameran sebagai puncak kegiatan P5 juga sudah terwujud. Namun dibalik itu, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Dari segi sumber daya, fasilitator dan tim penilai masih kurang menguasai tema karena kurangnya pelatihan dari pemerintah. Selain itu, letak sekolah yang berada di pusat kota mengakibatkan sulitnya mendapat sumber daya alam yang sesuai dengan tema yang berkaitan dengan alam. Dan yang perlu menjadi perhatian lagi adalah mindset peserta didik yang berorientasi pada hasil akhir P5 bukan lagi pada proses pelaksanaannya, sehingga peserta didik seringkali menggunakan cara instan agar mendapat hasil yang memuaskan. Akibatnya tujuan untuk menambah keterampilan juga kreativitas peserta didik tidak dapat tercapai dengan maksimal.

3.2. Teori George C. Edward III

Artikel ini mengadopsi sudut pandang pendekatan kualitatif deskriptif. Teori pelaksanaan kebijakan yang diciptakan oleh George C. Edward III adalah salah satu kerangka yang paling sering diterapkan dalam analisis kebijakan publik. George C. Edward III mengajukan sebuah pertanyaan kritis: "Apa saja prasyarat untuk implementasi kebijakan yang berhasil?". Ia mengidentifikasi empat indikator kunci yang secara signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan: (1) Komunikasi: Seberapa efektif informasi tentang kebijakan tersebut disampaikan (2) Sumber daya: Ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi (3) Sikap Pelaksana: Disposisi dan tanggapan dari mereka yang berkewajiban untuk memenuhi kebijakan (4) Struktur Birokrasi: Kerangka kerja organisasi dan proses-proses administrative. Keempat komponen ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika implementasi kebijakan.

Menurut Roring et al. keempat faktor tersebut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada pemahaman implementor tentang apa yang harus dilakukan. Untuk meminimalkan distorsi dalam implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada kelompok sasaran. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik atau tidak dipahami oleh kelompok sasaran, maka mereka dapat menentang kebijakan.

Meskipun kebijakan disampaikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil jika implementor kekurangan sumber daya. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, seperti kemampuan dan keterampilan implementor, serta sumber daya finansial. Untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, ketersediaan sumber daya sangat penting. Kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa tindakan jika tidak ada sumber daya yang memadai.

Disposisi merupakan sikap dan prinsip yang mengikat semua pemangku kepentingan. Sikap pelaksana sangat memengaruhi seberapa baik kebijakan dilaksanakan. Ari (2023), mengemukakan bahwa implementor harus berkomitmen, jujur, dan demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, mereka akan lebih mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, konflik sikap atau pandangan antara implementor dan pembuat kebijakan dapat menyebabkan proses implementasi menjadi tidak efektif.

Seberapa efektif pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi. Adanya prosedur operasi standar (SOP) yang jelas merupakan komponen penting dari struktur organisasi. SOP membantu setiap implementor melaksanakan tugas mereka. Namun, struktur yang panjang dan

rumit dapat menyebabkan birokrasi yang berbelit-belit dan mengurangi efektivitas pengawasan. Pada akhirnya, ini akan menghambat responsivitas dan fleksibilitas organisasi.

3.3. Analisis Implementasi Program P5 di SMA Negeri 9 Malang Berdasarkan Teori George C. Edward III

Komunikasi, menurut Akib dan Aji (2022) komunikasi adalah sesuatu yang fundamental, tetapi selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Komunikasi adalah cara orang berinteraksi satu sama lain dan menerima dan menyampaikan informasi yang merupakan elemen kunci untuk mentransfer pengetahuan dan pemahaman. Dalam konteks ini komunikasi sangat penting dalam menyampaikan program P5 di SMAN 9 Malang dengan tujuan implementasi secara langsung berjalan dengan lancar. Proses komunikasi melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari wakil kepala kurikulum yang menyampaikan informasi kepada fasilitator, selanjutnya fasilitator menginformasikan detail program kepada peserta didik dan orangtua mereka. Keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang dilakukan, yakni komunikasi yang transparan, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Melalui komunikasi yang efektif, seluruh pihak yang terlibat dapat memahami tentang tujuan dan arah program, sehingga implementasi P5 dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Sumber daya, dalam menerapkan Program P5 di SMAN 9 Malang, sekolah mengoptimalkan kualitas implementasi melalui beberapa strategi utama. Pertama, sekolah menugaskan narasumber berkompeten dan berpengalaman untuk menyampaikan materi teori di dalam kelas, yang bertujuan memastikan peserta didik memperoleh pemahaman komprehensif tentang proyek yang akan dilaksanakan. Kedua, pihak sekolah merancang modul pembelajaran secara cermat, memperhatikan aspek relevansi, sistematika, dan kejelasan materi. Proses penyusunan modul dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, sekolah juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa ruang dan fasilitas yang memadai. Di mana beberapa strategi di atas adalah faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program P5 di sekolah tersebut.

Disposisi, keberhasilan implementasi Program P5 di SMAN 9 Malang sangat ditentukan dari komitmen dan sikap para pemeran kebijakan. Kepala sekolah, wakil kepala, dan para guru menunjukkan dukungan penuh dan sikap positif terhadap program tersebut. Keterbukaan mereka pada perubahan dan inovasi menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program. Melalui komunikasi yang transparan, setiap fasilitator diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pendekatan ini memungkinkan setiap hambatan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sehingga penerapan Program P5 dapat berjalan dengan optimal.

Struktur birokrasi, implementasi Program P5 di SMAN 9 Malang dijalankan melalui struktur birokrasi yang terorganisir sistematis, dengan pembagian peran serta tanggung jawab masing-masing secara jelas. Hierarki struktural program dimulai dari kepala sekolah sebagai penentu arah utama, memastikan program sejalan dengan visi institusi. Wakil kepala kurikulum berperan strategis dalam perencanaan, melakukan koordinasi intensif dengan guru dan fasilitator terkait. Para guru bertindak sebagai fasilitator yang mengimplementasikan kegiatan proyek sesuai tema P5.

Untuk meningkatkan efektivitas, sekolah membentuk tim khusus yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan, memantau perkembangan, dan menyelesaikan berbagai tantangan yang mungkin timbul. Struktur birokrasi yang terdefinisi dengan baik ini menciptakan alur kerja yang efisien dan terukur. Guna memastikan keberhasilan program, sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Monitoring rutin dilakukan untuk mengidentifikasi capaian dan kendala selama implementasi, sementara evaluasi berkala digunakan untuk mengukur keberhasilan program dari aspek proses dan hasil. Pendekatan komprehensif ini bertujuan mencapai penguatan Profil Pelajar Pancasila secara maksimal.

4. Kesimpulan

Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Negeri 9 Malang berdasarkan teori George C. Edward III telah berjalan dengan sangat baik, terutama dalam aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sekolah berhasil menciptakan lingkungan yang

mendukung koordinasi dan pelaksanaan program secara efektif. Namun, terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kekurangan tenaga guru yang terlatih sebagai fasilitator dan penilai menjadi tantangan utama dalam memastikan kualitas pembelajaran berbasis proyek. Lokasi sekolah di area perkotaan juga menyulitkan akses terhadap bahan proyek yang berhubungan dengan alam, sehingga membatasi eksplorasi tema proyek. Selain itu, orientasi peserta didik yang lebih fokus pada hasil akhir proyek dibandingkan prosesnya menghambat pengembangan keterampilan kritis dan kolaboratif yang menjadi tujuan utama program ini. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih komprehensif, sekolah perlu mengatasi kendala ini dengan memberikan pelatihan khusus bagi guru, mencari alternatif kreatif untuk bahan proyek, dan menanamkan pentingnya proses pembelajaran kepada peserta didik. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Program P5 dapat lebih maksimal dalam mewujudkan pelajar yang berkarakter Pancasila. Bagi SMA Negeri 9 Malang seyogyanya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Negeri 9 Malang, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat kapasitas tenaga pendidik sebagai fasilitator dan penilai. Guru perlu diberikan pelatihan khusus yang mendalam tentang metode pembelajaran berbasis proyek, penilaian proses, serta pendampingan peserta didik secara optimal. Dengan bekal kompetensi tersebut, guru dapat lebih efektif mendukung peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, mengingat keterbatasan bahan proyek yang berkaitan dengan alam karena lokasi sekolah di perkotaan, diversifikasi tema proyek menjadi penting. Proyek dapat diarahkan pada isu-isu yang relevan dengan kondisi perkotaan, seperti *urban farming*, pengelolaan limbah, atau konservasi energi. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti komunitas lokal, organisasi lingkungan, atau pemerintah daerah, dapat membuka akses terhadap bahan dan sumberdaya tambahan. Sekolah juga perlu menanamkan nilai pentingnya proses dalam pembelajaran kepada peserta didik. Salah satu cara efektif adalah dengan mengintegrasikan penilaian berbasis proses, di mana peserta didik diminta untuk mendokumentasikan perjalanan mereka dalam mengerjakan proyek, termasuk tantangan dan keterampilan yang mereka pelajari. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya berkonsentrasi pada hasil akhir, tetapi mereka juga menghargai pengalaman belajar yang mereka peroleh sepanjang proses pengerjaan. Untuk mendukung pembelajaran, teknologi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Simulasi digital, video pembelajaran, atau tur virtual dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya berbasis alam. Selain itu, peserta didik dapat menggunakan teknologi untuk merancang proyek kreatif yang sesuai dengan tema perkotaan, sehingga tetap relevan dengan konteks lingkungan mereka. Agar implementasi Program P5 terus berkembang, evaluasi berkala diperlukan. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan secara administratif tetapi juga berhasil membentuk karakter pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan langkah-langkah ini, Program P5 di SMA Negeri 9 Malang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran berbasis nilai dan keterampilan yang berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Annisa, I. M., Istiharoh, & Putri, P. A. (2023). Program P5 sebagai implementasi Kurikulum Merdeka: Faktor penghambat dan upayanya. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 1(2), 176–187. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v1i2.153>
- Astutik, A. P., & Farista, R. (n.d.). *Respon kebijakan Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan Islam*.
- Ayuningtyas, A. (2023, November 20). P5 Kurikulum Merdeka: Penerapan, tahapan, manfaat, dan contohnya. Diakses pada 26 November 2024, dari <https://dosenppkn.com/p5-kurikulum-merdeka/>
- Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). *Analisis evaluasi program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka* (Vol. 4).
- Kemendikbudristek. (2021). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak*.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Implementasi program Kurikulum Merdeka berdasarkan kebijakan* (Vol. 3).
- Nafaridah, T., Maulidia, L., Ratumbusang, F. N. G., Kesumasari, M. E., & Universitas Lambung Mangkurat. (n.d.). *Analisis kegiatan P5 sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka era digital di SMA Negeri 2 Banjarmasin*.
- Rahmadani, E., Zuljalal, M., & Hamdany, A. (2023). *Implementasi nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah dasar* (Vol. 6).

Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (n.d.). Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2).

Sugiyono, S. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Sururi, M., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan teoretis dan model implementasi kebijakan Edwards III*. Indonesia Emas Group.

Syubhan, A., & Aji, A. W. (2022). *Peran komunikasi dalam dunia pendidikan* (Vol. 4).

Tyas, A. (2023). *Dimensi disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

UNESCO. (2021). *Futures of education initiative*. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>

Wahyudin, D., Malik, A., & Subkhan, E. (2024). *Kajian akademik Kurikulum Merdeka*.